

# CATATAN ATAS LAPORAN

## KEUANGAN (CALK)

### Stasiun PSDKP Biak

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024



Jl. Adibai KM. 6,5 Sumberker Distrik Samofa Kabupaten

Biak – Numfor Papua 98156



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengawasan SDKP Biak adalah salah satu satker Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Biak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Biak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Biak, 11 Juli 2024  
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak



Mochamad Erwin, S,St.Pi, MH  
NIP. 19830612 200801 1 006

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	62
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	76
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	84
F. Pengungkapan Penting Lainnya	87
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156  
Telp.(0981) 8211818 Pos Elektronik :[psdkp.biak@kkp.go.id](mailto:psdkp.biak@kkp.go.id)

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Biak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Biak, 11 Juli 2024

Kepala Stasiun PSDKP Biak,



  
Mochamad Erwin, S,St.Pi, MH  
NIP. 19830612 200801 1 006

Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp20.191.740,00.

Realisasi Belanja Negara pada periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp8.357.228.940,00 atau mencapai 34% dari alokasi anggaran sebesar Rp24.894.597.000,00.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 14.575.511.461,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp681.512.682,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.893.998.779,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp568.915.481,00 dan Rp14.006.595.980,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3.162.536,00 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar 9.476.184.687,00 sehingga terdapat

Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(9.471.093.151,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(5.599.317,00) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp Rp(9.476.692.468,00).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp15.146.176.350,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(9.476.692.468,00) kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp74.898,00 ditambah selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0, koreksi nilai aset non revaluasi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.337.037.200,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp14.006.595.980,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN	REALISASI	% thd Angg	ANGGARAN	REALISASI	%thd Angg
<b>PENDAPATAN</b>							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	20.191.740	0,00	25.760.000	9.514.734	36,94
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	20.191.740	-	-	9.514.734	-
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>						
Belanja Pegawai	B.3	7.117.436.000	3.687.325.379	51,81	5.743.704.000	2.681.685.556	46,69
Belanja Barang	B.4	16.226.759.000	4.410.614.161	27,18	18.054.578.000	8.191.450.838	45,37
Belanja Modal	B.5	1.550.402.000	259.289.400	16,72	2.033.068.000	495.008.264	24,35
<b>JUMLAH BELANJA</b>		24.894.597.000	8.357.228.940	33,57	25.831.350.000	11.368.144.658	44,01

**STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK**  
**NERACA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)
		2024	2023	Jumlah
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	300.000.000	-	300.000.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	14.979.504	14.979.504
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan	C.7	-	(74.898)	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-	-
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	C.9	-	14.904.606	-
Persediaan	C.10	381.512.682	199.973.189	181.539.493
Jumlah Aset Lancar		<b>681.512.682</b>	<b>214.877.795</b>	<b>466.634.887</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-	-
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	C.14	4.529.803.000	4.529.803.000	-
Peralatan dan Mesin	C.15	27.219.095.476	27.222.726.187	3.630.711
Gedung dan Bangunan	C.16	6.303.821.055	6.303.821.055	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	855.830.143	855.830.143	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	52.387.273	52.387.273	-
Akumulasi Penyusutan	C.20	(25.066.938.168)	(24.015.119.156)	1.051.819.012
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.20	-	-	-
Jumlah Aset Tetap		<b>13.893.998.779</b>	<b>14.949.448.502</b>	<b>(1.055.449.723)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>14.575.511.461</b>	<b>15.164.326.297</b>	<b>(588.814.836)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Uang Muka dari KPPN	C.24	300.000.000	-	300.000.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	268.915.481	18.149.947	250.765.534
Utang yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<b>568.915.481</b>	<b>18.149.947</b>	<b>550.765.534</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>568.915.481</b>	<b>18.149.947</b>	<b>550.765.534</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
Ekuitas	C.28	14.006.595.980	15.146.176.350	(1.139.580.370)

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2024	2023	Jumlah	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.162.536	5.534.438	(2.371.902)	(43)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.162.536</b>	<b>5.534.438</b>	<b>(2.371.902)</b>	<b>-</b>
<b>BEBAN</b>					
Beban Pegawai	D.2	3.923.543.860	2.862.611.716	1.060.932.144	37,062
Beban Persediaan	D.3	37.054.390	48.628.678	(11.574.288)	(24)
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.453.783.141	6.645.054.651	(4.191.271.510)	(63,074)
Beban Barang Pemeliharaan	D.5	370.071.001	523.853.588	(153.782.587)	(29,356)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.382.713.189	886.814.852	495.898.337	55,919
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.307.090.106	885.372.852	421.717.254	47,632
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>9.474.255.687</b>	<b>11.852.336.337</b>	<b>(2.378.080.650)</b>	<b>(20,064)</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(9.471.093.151)</b>	<b>(11.846.801.899)</b>	<b>2.375.708.748</b>	<b>(20,054)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	- 5.599.317	4.770.930	- 10.370.247	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		2.049.700	4.770.930	- 2.721.230	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		7.649.017	-	7.649.017	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	#DIV/0!
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(5.599.317)</b>	<b>4.770.930</b>	<b>(10.370.247)</b>	<b>(217,363)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(9.476.692.468)</b>	<b>(11.842.030.969)</b>	<b>2.365.338.501</b>	<b>(19,974)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
Pendapatan PNPB	D.12	-	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-	-	-
Beban Persediaan		-	-	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(9.476.692.468)</b>	<b>(11.842.030.969)</b>	<b>2.365.338.501</b>	<b>(19,974)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan(Penurunan)	
		30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	Jumlah	%
EKUITAS AWAL	E.1	15.146.176.350	15.483.258.786	(337.082.436)	(2,18)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9.476.692.468)	(11.842.030.969)	2.365.338.501	(19,97)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	74.898	(7.270.526)	7.345.424	(101,03)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	(7.270.526)	7.270.526	(100,00)
LAIN-LAIN	E.3.6	74.898	-	74.898	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	8.337.037.200	11.358.629.924	(3.021.592.724)	(26,60)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.139.580.370)	(490.671.571)	(648.908.799)	132,25
EKUITAS AKHIR	E.5	14.006.595.980	14.992.587.215	(985.991.235)	(6,58)

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Biak

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. **Visi dan Misi Direktorat Jenderal PSDKP** memiliki Visi Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut. Dan Misi Pengawasan Kelautan dan Perikanan serta Keamanan Laut; Penguatan Lembaga, aparatur pengawas dan penegakan hukum, serta masyarakat; dan Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran. Yang sesuai dengan **Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan** yakni Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 717. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak meliputi Perairan di sekitaran Samudra Pasifik.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di emban adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Biak berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported, and Unregulated**

**(IUU) Fishing, dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- Tersedianya infrastruktur Pengawasan SDKP, sistem informasi, dan komunikasi pengawasan SDKP
- Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif
- Terwujudnya ASN UPT PSDKP yang kompeten
- Informasi pengawasan SDKP yang valid, handal, dan mudah diakses
- Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi UPT PSDKP yang berkepribadian
- Terkelolanya anggaran UPT PSDKP secara efisien.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Stasiun PSDKP Biak didukung oleh ketersediaan SDM yang berkompeten diantaranya sebagai berikut :
  1. PNS 27 pegawai (Struktural 2 orang, Fungsional 8 orang dan Administrasi 17 orang);
  2. Awak KP Hiu Macan 04 sebanyak 17 pegawai;
  3. PPPK 13 Orang
  4. PPNP 6 Orang
  5. PJLP 13 Org

*Pendekatan  
Penyusunan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

- Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini

*Laporan  
Keuangan*

merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

*Basis  
Akuntansi*

**A.3. Basis Akuntansi**

Stasiun PSDKP Biak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Biak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Biak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara *First In First Out* (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2022, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Biak adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada

Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset

Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

## *Aset Lainnya*

### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis  
Akrual  
Pertama Kali*

**(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward*

*accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak telah mengadakan 6 (enam) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Revisi DIPA ke-1 dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
  1. Penghapusan detil honor petugas keamanan. Pengemudi Stasiun PSDKP Biak
  2. Pengurangan Pagu anggaran honor petugas kebersihan/pramubakti Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp200.880.000,- (Dua Ratus Juta Delapa Ratus Delapan Puluh Rupiah)
  3. Penghapusan detil honor THR Keagamaan petugas keamanan dan Pengemudi
  4. Pengurangan pagu anggaran detil THR Keagamaan petugas kebersihan/Pramubakti Stasiun dan Satwas sebesar Rp16.740.000,- (Enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
  5. Pengurangan pagu anggaran detil Uang lembur PPNPN Sebesar Rp92.352.000,- (Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)
  6. Pengurangan pagu anggaran detil Uang makan lembur PPNPN Sebesar Rp54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah)
  7. Penambahan pagu anggaran detil Jamuan Tamu sebesar Rp154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu

- rupiah)
8. Penambahan detil pagu anggaran belanja jasa petugas keamanan sebesar Rp316.413.000,- (Tiga ratus enam belas juta empat ratus tiga belas rupiah)
  9. Penambahan detil pagu anggaran belanja jasa penemudi Operasional sebesar Rp63.282.000,- (Enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
  10. Penambahan detil pagu anggaran belanja jasa Pramubakti sebesar Rp230.094.000,- (Dua ratus tiga puluh juta sembilan puluh empat rupiah)
  11. Penambahan detil pagu anggaran belanja jasa petugas kebersihan sebesar Rp57.523.000,- (Lima puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
  12. Penambahan detil pagu anggaran belanja jasa THR Keagamaan petugas keamanan sebesar Rp26.367.000,- (Dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
  13. Penambahan detil pagu anggaran belanja jasa THR Keagamaan pengemudi operasional sebesar Rp5.273.000,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
  14. Penambahan detil pagu anggaran belanja jasa THR Keagamaan Pramubakti sebesar Rp19.174.000,- (Sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
  15. Penambahan detil pagu anggaran belanja jasa THR Keagamaan petugas kebersihan sebesar Rp4.793.000,- (Empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

16. Pengurangan pagu anggaran detil Laptop sebesar Rp6.999.000,- (Enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

17. Penamabahan detil pagu anggaran Drone sebesar Rp7000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Revisi DIPA ke-2 dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2024 dengan perubahan anggaran berikut:

1. Pengurangan pagu anggaran detil Bahan bakar minyak (1 unit kapal) sebesar Rp920.185.000,- (Sembilan ratus dua puluh juta seratus delapan puluh lima rupiah)

2. Pengurangan pagu anggaran detil Pelumas (1 unit kapal) sebesar Rp8.079.000,- (Delapan juta tujuh puluh sembilan rupiah)

3. Pengurangan pagu anggaran detil Biaya angkut BBM (1 unit kapal) sebesar Rp8.764.000,- (Delapan juta tujuh ratis enam puluh empat rupiah)

4. Penambahan pagu ananggaran detil Uang jaga sandar Kapal Hiu Macan 04 sebesar Rp3.632.000,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

5. Pengurangan pagu anggaran detil biaya delegasi KP HIU Macan 04 sebesar Rp34.400.000,- (Tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)

6. Pengurangan pagu anggaran detil Konsumsi rapat evaluasi gelar operasi KP. Hiu Macan 04 sebesar Rp414.000,- (Empat ratus empat belas ribu rupiah)

7. Pengurangan pagu anggaran detil Docking kapal pengawas sebesar Rp66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah)

8. Penghapusan pagu anggaran detil Service

- perlengkapan navigasi dan komunikasi sebesar Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
9. Penghapusan pagu anggaran detil Konsumsi rapat perencanaan pengawasan pencemaran laut sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
  10. Penghapusan pagu anggaran detil Perlengkapan peserta dan panitia sebesar Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
  11. Penghapusan pagu anggaran detil ATK sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
  12. Penghapusan pagu anggaran detil Konsumsi kegiatan sosialisasi sebesar Rp5.640.000,- (Lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
  13. Penghapusan pagu anggaran detil Spanduk sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Revisi DIPA ke-3 dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
    1. Penambahan detil perjalanan dinas biasa perjalanan dinas perencanaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP sebesar Rp16.873.000,- (Enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
    2. Penambahan detil perjalanan dinas biasa perjalanan dinas Monitoring dan Evaluasi pembangunan prasarana pengawasan SDKP sebesar Rp50.619.000,- (Lima puluh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah)
    3. Pengurangan pagu anggaran detil Air bersih (1 unit kapal) sebesar Rp2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)

4. Penambahan pagu anggaran detil Pelumas (1 unit kapal) sebesar Rp2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
5. Penambahan detil Perjalan dinas dalam rangka Monitoring dan evaluasi speedboat pengawas Rp8.640.000,- (Delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
6. Penambahan detil Perjalanan dinas pengendalian docking sebesar Rp20.250.000,- (Dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Penambahan detil Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian perawatan darurat kapal pengawas sebesar Rp13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
8. Penambahan detil perjalanan dinas Narasumber/peserta pusat sebesar Rp12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah)
9. Penambahan detil Perjalanan dinas koordinasi dengan instansi terkait sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)
10. Penambahan detil perjalanan dinas dalam rangka menghadiri ekspose kasus pengenaan sanksi administratif pangkalan/stasiun/satwas/wilker SDKP sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
11. Penambahan detil perjalanan dinas dalam rangka pencemaran perairan sebesar Rp17.260.000,- (Tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
12. Penambahan detil perjalanan dinas konsultasi

- perencanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha SDK ke Provinsi sebesar Rp6.936.000,- (Enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
13. Penambahan detil perjalanan dinas pengawasan pemanfaatan ruang laut luar kota sebesar Rp22.368.000,- (Dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan rupiah)
  14. Penambahan detil perjalanan dinas koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang laut ke Loka PSPL Sorong sebesar Rp22.334.000,- (Dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
  15. Penambahan detil perjalanan dinas koordinasi hasil evaluasi pemeriksaan kepatuhan unit usaha SDK ke provinsi sebesar Rp13.872.000,- (Tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
  16. Penambahan detil perjalanan dinas koordinasi perencanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan yang di awasai dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak ke provinsi sebesar Rp5.038.000,- (Lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah)
  17. Penambahan detil Paket E-Drive sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
  18. Penambahan detil Paket vidio converence sebesar Rp2.593.000,- (Dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
  19. Pengurangan pagu anggaran deti Jamuan tamu sebesar Rp4.093.000,- (Empat juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)
  20. Penambahan detil perjalan dinas Ujian dinas

- kenaikan pangkat/penyesuaian ijazah sebesar Rp47.320.000,- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
21. Penambahan detil Perjalanan dinas pengambilan sumpah jabatan pengawas fungsioanal dan strutural sebesar Rp23.550.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
  22. Penambahan detil perjalana dinas Monev SDMA sebesar Rp11.830.000,- (Sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
  23. Penambahan detil perjalanan dinas Pindah Tugas pegawai sebesar Rp21.700.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
  24. Penambahan detil perjalanan dinas Uji kompetensi Jabfung pengawas perikanan sebesar Rp23.660.000,- (Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
  25. Penambahan detil perjalanan dinas Pembinaan dan fasilitasi Administrasi PPNS sebesar Rp11.830.000,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
  26. Penambahan detil perjalanan dinas Rakernis sebesar Rp36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah)
  27. Penambahan detil perjalanan dinas Ratekcan sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah)
  28. Penambahan detil perjalanan dinas Finalisasi sebesar Rp33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah)
  29. Penamabahan detil perjalanan dinas ke kanwil sebesar Rp7.100.000,- (Tujuh juta seratis ribu

- rupiah)
30. Penambahan detil perjalanan dinas Monev UPT sebesar Rp24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)
  31. Penambahan detil perjalanan dinas Monev satwas sebesar Rp24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)
  32. Penambahan detil perjalanan dinas Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan semester II 2023 sebesar Rp22.750.000,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  33. Penambahan detil perjalanan dinas monev pengelolaan arsip dan persuratan di pusat sebesar Rp28.473.000,- (Dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- Revisi DIPA ke-4 dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
    1. Penambahan detil perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis pengawasan SDKP sebesar Rp323.705.000,- (Tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah)
    2. Penambahan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penerapan sanksi administratif ke pusat sebesar Rp20.913.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)
    3. Penambahan detil perjalanan dinas dalam rangka evaluasi pemeriksaan kepatuhan unit usaha SDK ke pusat sebesar Rp14.053.000,- (Empat belas juta Lima puluh tiga ribu rupiah)
    4. Penambahan detil perjalanan dinas Rekonsiliasi

- BMN SMT II 2023 dan SMT I 2024 sebesar Rp15.089.000,- (Lima belas juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)
5. Penambahan detail perjalanan dinas Undangan/Bimtek/Koordinasi sebesar Rp157.620.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
  6. Penambahan detail perjalanan dinas Pimpinan sebesar Rp225.337.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
  7. Perubahan detail Kompresor selam menjadi Kompresor udara
  8. Pengurangan dan perubahan detail Drone menjadi Kamera Udara sebesar Rp1000.000,- (Satu juta rupiah)
  9. Pengurangan pagu anggaran detail Kendaraan roda 4 pengangkut logistik kapal sebesar Rp37.094.000,- (Tiga puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah)
  10. Penambahan pagu anggaran detail Kendaraan roda 4 pengangkut logistik kapal sebesar Rp37.094.000,- (Tiga puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah)
  11. Penambahan detail perjalanan dinas Monev semester I tahun 2024 sebesar Rp32.181.000,- (Tiga puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

- Revisi DIPA ke-5 dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
  1. Penambahan pagu anggaran detail Belanja tunjangan

- PPH PNS (ke-14) sebesar Rp4.856.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
2. Penambahan pagu anggaran detil Tunjangan kinerja PNS (ke-14) sebesar Rp87.218.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
  3. Penambahan pagu anggaran detil Tunjangan kinerja PPPK (ke-14) sebesar Rp7.452.000,- (Tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
  4. Penambahan pagu anggaran detil Belanja gaji pokok PPPK (ke-14) sebesar Rp7.452.000,- (Tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
  5. Penambahan pagu anggaran detil Tunjangan suami/istri PPPK (ke-14) sebesar Rp570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  6. Penambahan pagu anggaran detil Tunjangan anak PPPK (ke-14) sebesar Rp69.000,- ( Enam puluh sembilan ribu rupiah)
  7. Penambahan pagu anggaran detil Tunjangan Fungsional PPPK (ke-14) sebesar Rp480.000,- ( Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
  8. Pengurangan pagu anggaran pembayaran tunjangan kinerja PPPK sebesar Rp8.571.000,- (Delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Revisi Dipa ke-6 dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
    1. Penambahan pagu anggaran detil Translok pelaksanaan dan tindak lanjut pengawasan perikanan stasiun PSDKP Jayapura sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)
    2. Pengurangan pagu anggaran pelaksanaan dan

- tindak lanjut pengawasan perikanan stasiun PSDKP Manokwari sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pengurangan pagu anggaran detil Belanja gaji pokok PNS (ke-14) sebesar Rp1.946.000,- ( Satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
  4. Pengurangan pagu anggaran detil Belanja gaji pokok PNS (ke-13) sebesar Rp919.000,- (Sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)
  5. Pengurangan pagu anggaran detil Belanja tunjangan suami/istri (ke-14) sebesar Rp204.000,- Dua ratus empat ribu rupiah)
  6. Pengurangan pagu anggaran detil Belanja tunjangan suami/istri (ke-13) sebesar Rp129.000,- (Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
  7. Penambahan pagu anggaran detil Belanja tunjangan anak (ke-13) sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah)
  8. Pengurangan pagu anggaran detil Belanja tunjangan fungsional (ke-14) sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
  9. Pengurangan pagu anggaran detil Belanja tunjangan fungsional (ke-13) sebesar Rp670.000,- (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  10. Penambahan pagu anggaran detil Belanja tunjangan PPH PNS (ke-13) sebesar Rp4.843.000,- (Empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
  11. Pengurangan pagu anggaran detil Belanja tunjangan umum (ke-13) sebesar Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)

12. Penambahan pagu anggaran detil Tunajangan PNS (ke-13) sebesar Rp88.958.000,- (Delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
13. Pengurangan pagu anggaran detil Tunajangan PNS sebesar Rp97.654.000,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)
14. Penambahan pagu anggaran detil belanja gaji pokok PPPK (ke-13) sebesar Rp7.452.000,- (Tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
15. Penambahan pagu anggaran detil belanja tunjangan suami/istri PPPK (ke-13) sebesar Rp570.000,-
16. Penambahan pagu anggaran detil belanja tunjangan anak PPPK (ke-13) sebesar Rp69.000,- (Enam puluh sembilan ribu rupiah)
17. Penambahan pagu anggaran detil belanja tunjangan fungsional PPPK (ke-13) sebesar Rp480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
18. Pengurangan pagu anggaran detil Perpanjangan STNK kendaraan roda 4 pengangkut logistik kapal pengawas sebesar Rp99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
19. Penambahan pagu anggaran detil Perpanjangan STNK kendaraan roda 4 Pimpinan sebesar Rp99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Tidak terdapat perubahan pagu total dari pagu alokasi pada semester 1 Tahun 2024. Namun demikian terdapat anggaran yang diblokir dalam rangka cadangan automatic adjustment sebesar Rp1.445.283.000 (Satu miliar empat

ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah):

URAIAN	PAGU ALOKASI	PAGU REVISI 6	SELISIH
Belanja Pegawai	7.117.436.000	7.117.436.000	-
Belanja Barang	16.226.759.000	16.226.759.000	-
Belanja Modal	1.550.402.000	1.550.402.000	-
<b>Total</b>	<b>24.894.597.000</b>	<b>24.894.597.000</b>	-

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp20.191.740,0  
0*

### **B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.191.740,00 dan Rp9.514.734,00. Pendapatan (Pendapatan Negara Bukan Pajak) tahun anggaran 2024 adalah pendapatan yang diperoleh dari beberapa jenis pendapat sebagai berikut:

1. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Januari 2024 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 001A;
2. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Februari 2024 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 005A ;
3. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Maret 2024 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 0102A;
4. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan April 2024 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 075T;
5. Pendapatan dari penjualan 1 paket peralatan dan

mesin inventaris kantor sebesar Rp2.049.700,00 dengan sesuai dengan Risalah Lelang nomor 67/17.04/2024-01 tanggal 30 Mei 2024 dengan nomor NTPN : 865263CIFKA1IVSD dan NTB : 240603306184;

6. Pendapatan dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu berupa Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp4.024.504,00 telah disetorkan pada tanggal 07 Februari 2024 5dengan nomor NTPN : AD42B2G4VPBRIU59 dan NTB : 240207520851;
7. Pendapatan dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa Pengembalian Belanja Pegawai Tahun 2021-2023 Rp10.955.000,00 terdiri dari :
  - a. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2021 Pegawai An. Apyam Mei Kbarek sebesar Rp1.980.000,00 yang telah disetorkan pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Nomor NTPN : 991CF48VVEPJ501S dan NTB 240507284175;
  - b. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2022 Pegawai An. Apyam Mei Kbarek sebesar Rp2.520.000,00 yang telah disetorkan tanggal 07 Mei 2024 dengan Nomor NTPN 3C1361QV3UBV0LO dan NTB 240507284077;
  - c. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan

Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2023 Pegawai An. Apyam Mei Kbarek sebesar Rp2.570.000,00 yang telah disetorkan tanggal 07 Mei 2024 dengan Nomor NTPN FE53C6U8EUGOC0IP dan NTB 240507283915;

d. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2022 Pegawai An. Charles Audi Katili sebesar Rp2.220.000,00 yang telah disetorkan tanggal 07 Mei 2024 dengan Nomor NTPN 87036CIFK76O04U dan NTB 240507283755;

e. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2023 Pegawai An. Charles Audi Katili sebesar Rp1.665.000,00 yang telah disetorkan tanggal 07 Mei 2024 dengan Nomor NTPN C0FF355DF9BVI17P dan NTB 240507283656;

*Rincian Pendapatan Semester I TA 2024 dan Semester I TA 2023*

AKUN	URAIAN	2024	2023
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.162.536	4.743.804
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.024.504	4.770.930
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.049.700	
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.955.000	
	<b>Total</b>	<b>20.191.740</b>	<b>9.913520</b>

## Realisasi

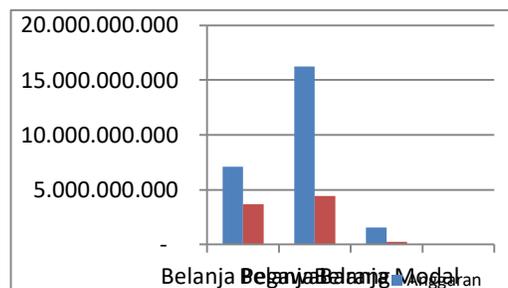
Belanja Negara  
Rp8.357.228.940,00

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada semester I TA 2024 adalah sebesar Rp8.357.228.940,00 atau 34% dari anggaran belanja sebesar Rp24.894.597.000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada semester I TA 2023 adalah sebesar Rp11.368.144.658,00 atau 44% dari anggaran belanja sebesar Rp25.831.350.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	30 JUNI 2023			30 JUNI 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	7.117.436.000	3.687.325.379	52	5.743.704.000	2.681.685.556	47
Belanja Barang	16.226.759.000	4.410.614.161	27	18.054.578.000	8.191.450.838	45
Belanja Modal	1.550.402.000	259.289.400	17	2.033.068.000	495.008.264	24
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>24.894.597.000</b>	<b>8.357.228.940</b>	<b>34</b>	<b>25.831.350.000</b>	<b>11.368.144.658</b>	<b>44</b>
Pengembalian						
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>24.894.597.000</b>	<b>8.357.228.940</b>	<b>34</b>	<b>25.831.350.000</b>	<b>11.368.144.658</b>	<b>44</b>



Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 menunjukkan bahwa dari segi persentase realisasi belanja per 30 Juni 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja pada 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan docking kapal pengawas. Pelaksanaan docking kapal ini sebelumnya direncanakan pada awal tahun 2024 atau tepatnya pada Triwulan I tahun 2024, namun karena adanya kendala dalam proses persiapan docking menyebabkan rencana yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan perhitungan penyesuaian harga Rincian Anggaran Biaya (RAB) Docking Kapal Pengawas tahun 2024 oleh Konsultan Perencana Docking Kapal yang telah dilakukan pada tahun 2022 sebagai dasar Stasiun PSDKP Biak dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk melakukan pemilihan penyedia dengan metode Tender.

Dalam mengantisipasi keterlambatan tersebut, Stasiun PSDKP Biak berkoordinasi dengan Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan menyarankan Stasiun PSDKP Biak untuk melaksanakan Docking Kapal Pengawas melalui metode E-Purchasing. Tahapan ini perlu dilakukan oleh Stasiun PSDKP Biak sebelum menentukan metode tender (yang merupakan pilihan terakhir dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah) sebagai metode pemilihan penyedia pengadaan docking kapal pengawas TA 2024. Berdasarkan hal tersebut, Stasiun PSDKP Biak akhirnya melaksanakan docking kapal pengawas melalui metode E-Purchasing dan

telah mendapatkan penyedia untuk melaksanakan docking kapal pengawas pada bulan Juni 2024.

Dengan adanya perubahan rencana pelaksanaan docking kapal pengawas tersebut, menyebabkan operasi kapal pengawas berjalan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Operasi kapal pengawas pada triwulan 2 tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan karena kapal sedang dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan docking. Selain itu, kerusakan mesin bantu (*Auxiliary Engine*) kapal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak berjalannya operasi kapal pengawas.

Terhambatnya pelaksanaan operasi kapal pengawas mempengaruhi penyerapan anggaran BBM dimana pembelian BBM tidak dapat dilakukan karena BBM yang terdapat dalam tanki kapal masih mencukupi karena tidak adanya pemakaian BBM selama triwulan ke 2 tahun 2024.

Pelaksanaan docking kapal pengawas selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dimulai tanggal 11 Juni 2024 dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2024. Anggaran yang telah disepakati dalam pelaksanaan docking kapal pengawas tahun 2024 yaitu sebesar Rp 1.450.000.000,- dan menyisakan anggaran sebesar Rp 277.720.000,- dari pagu anggaran Rp 1.727.720.000,-. Sisa anggaran yang ada akan dimaksimalkan dalam perawatan armada kapal pengawas Stasiun PSDKP Biak. Pembayaran anggaran pelaksanaan docking kapal direncanakan di bulan Agustus tahun 2024.

### *Belanja Pegawai* **B.3 Belanja Pegawai**

*Rp3.687.325.379,00*

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada semester I TA 2024 sebesar Rp3.687.325.379,00. dari pagu anggaran sebesar Rp7.117.436.000,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai semester 1 TA 2024 dibayarkan untuk 57 Pegawai dan 160 Jiwa, yaitu meliputi : Belanja Gaji Pokok PNS & PPPK, Belanja Pembulatan Gaji PNS & PPPK, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS & PPPK, Belanja Tunjangan Anak PNS & PPPK, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional, Belanja Tunjangan Umum, Belanja Tunjangan Beras, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Uang Lembur, Belanja Tunjangan Khusus (Tunjangan Kinerja Pegawai), dan Tunjangan Khusus Papua dengan Rincian belanja pegawai adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023
Belanja Gaji Pokok PNS	1.127.261.400	1.070.642.500
Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.357	17.862
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	90.295.920	85.323.540
Belanja Tunj. Anak PNS	30.428.620	27.721.892
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.200.000	7.200.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	19.880.000	19.790.000
Belanja Tunj. PPh PNS	9.843.320	274.900
Belanja Tunj. Umum PNS	46.160.000	52.735.000
Belanja Tunj. Beras PNS	79.517.160	81.110.400
Belanja Uang Makan PNS	78.748.000	94.867.000
Belanja Uang Lembur PNS	36.035.000	33.195.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.296.816.820	1.096.212.462
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	105.625.000	112.595.000
Belanja Gaji Pokok PPPK	287.847.600	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.980	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	10.754.560	-
Belanja Tunj. Anak PPPK	2.259.600	-
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	25.440.000	-
Belanja Tunj. Beras PNS	12.745.920	-
Belanja Uang Makan PPPK	24.823.000	-
Belanja Uang Lembur PPK	22.537.000	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	346.674.122	-
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	27.600.000	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.688.515.379</b>	<b>2.681.685.556</b>
Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS	920.000	
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	270.000	
<b>Jumlah Pengembalian Belanja</b>	<b>1.190.000</b>	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.687.325.379</b>	<b>2.681.685.556</b>

Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS Sebesar Rp920.000 berasal dari Pengembalian Tunjangan Umum

Pegawai Tugas Belajar Tahun 2024 An. Hamzah Hilal Fakaubun Rp185.000 telah disetor Kembali pada tanggal 7 Mei 2024 NTPN 81E801GCAG8O6RGG, An. Jembrels Rikumahu Rp180.000,00 telah disetor Kembali pada tanggal 7 Mei 2024 NTPN 4F7605229QI9QRGS dan An. Apyam Mei Kbarek Rp555.000,00 telah disetor Kembali pada tanggal 7 Mei 2024 NTPN FB1F15229QI09194.

Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sebesar Rp270.000 berasal dari Pengembalian Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar Tahun 2024 An. Woro Sumbodo Mulyadi telah disetor Kembali pada tanggal 7 Mei 2024 NTPN 85D182CPQAR4JRGD

*Belanja Barang*  
*Rp4.410.614.161*  
*,00*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang semester I per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp4.410.614.161,00 (27%) dari pagu anggaran Rp16.226.759.000,00. Realisasi Belanja Barang semester I TA 2023 lebih rendah bila dibandingkan dengan semester I TA 2023 sebesar Rp8.191.450.838,00 (45%) dari pagu anggaran Rp18.054.578.000,00. Hal tersebut dikarenakan penyerapan realisasi anggaran belanja barang semester I 2024 terkendala docking Kapal Pengawas Hiu Macan 04 yang belum selesai sehingga terhambatnya operasi kapal pengawas Hiu Macan 04. Terhambatnya pelaksanaan operasi kapal pengawas mempengaruhi penyerapan anggaran BBM dimana pembelian BBM tidak dapat dilakukan karena BBM yang terdapat dalam tanki kapal masih mencukupi karena tidak adanya pemakaian BBM selama triwulan ke 2 tahun 2024. Kapal pengawas dipergunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan

sumber daya kelautan dan perikanan serta untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal asing dan kapal indonesia yang melakukan operasional di WPP-RI 717. Selain itu terdapat belanja barang yang diperuntukkan bagi operasional speedboat dan kapal pengawas berupa belanja pelumas, suku cadang, dan pemeliharaan kapal pengawas dan speedboat serta belanja barang untuk mendukung operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan penanganan pelanggaran.

Termin	Deskripsi Termin	Nilai Termin	Tanggal SP2D	Tertagihkan	Sisa Termin
1	BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04	521.403.000	25-Mar-24	474.000.000	47.403.000
2	BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04	521.403.000	22-Apr-24	237.000.000	284.403.000
3	BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04	521.403.000	-	-	521.403.000
4	BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04	521.403.000	-	-	521.403.000
5	BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04	521.403.000	-	-	521.403.000
6	BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04	521.403.000	-	-	521.403.000
7	BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04	521.403.000	-	-	521.403.000
8	BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04	404.088.000	-	-	404.088.000
9	BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04	136.731.000	-	-	136.731.000
		<b>4.190.640.000</b>		<b>711.000.000</b>	<b>3.479.640.000</b>

*Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Jasa	800.067.554	405.094.155	97,50
Belanja Pemeliharaan	527.635.984	703.349.087	(24,98)
Belanja Perjalanan Dinas	1.385.633.189	886.814.852	56,25
Belanja Persediaan	61.028.900	31.377.000	94,50
Belanja Operasional	513.470.911	991.019.853	(48,19)
Belanja Non Operasional	1.126.105.623	5.173.795.891	(78,23)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.413.942.161</b>	<b>8.191.450.838</b>	(46,12)
Pengembalian Belanja	3.328.000	-	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.410.614.161</b>	<b>8.191.450.838</b>	(46,16)

- Belanja Barang Operasional pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti belanja keperluan sehari-hari perkantoran, perpanjangan STNK kendaraan bermotor, penambah daya tahan tubuh, pengiriman pos, honor pengelola anggaran, dan belanja operasional lainnya.
- Belanja barang Non Operasional pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk KP. Hiu Macan 04, belanja bahan makanan untuk AKP, konsumsi kegiatan rapat dan belanja non operasional lainnya.
- Belanja barang persediaan pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti pengadaan alat tulis kantor, *computer supply*, blanko persuratan, suku cadang KP. HMC 04 dan Speedboat, daftar arus pasang surut,.
- Belanja jasa pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti belanja langganan listrik, telepon dan air.
- Belanja pemeliharaan pada Stasiun PSDKP Biak

meliputi : pemeliharaan peralatan dan mesin (contohnya perbaikan darurat kapal pengawas, perawatan rutin *speedboat*, pemeliharaan komputer, laptop, AC, genset, kendaraan dinas, dan lain-lain) dan pemeliharaan gedung dan bangunan (pemeliharaan mess, kantor Stasiun PSDKP Biak, pemeliharaan bangunan operator Stasiun PSDKP Biak, pemeliharaan bangunan fungsional pengawasan,).

- Belanja perjalanan dinas pada Stasiun PSDKP Biak meliputi perjalanan dinas biasa, antara lain perjalanan dinas pindah tugas pegawai, perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis pengawasan SDKP, perjalanan dinas dalam kota, dan perjalanan dinas paket meeting luar kota antara lain seperti transpor lokal untuk kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK) *destructive fishing*, pengawasan SDK lainnya; Transport lokal dan perjalanan dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan dan belanja perjalanan dinas dalam negeri lainnya.
- Pengembalian belanja senilai Rp3.328.000,00 berasal dari pengembalian belanja perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan FGD perhitungan total nilai investasi dalam pemanfaatan ruang laut an. Decki senilai **Rp1.460.000,00** yang telah disteorkan pada tanggal 28 juni 2024 dengan NTPN : 657032CPQBUT7SLH, pengembalian belanja perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan FGD perhitungan total nilai investasi dalam pemanfaatan ruang laut an.Mochamad Erwin senilai **Rp1.460.000,00** yang telah disteorkan pada tanggal 28

*Belanja Modal*  
*Rp259.289.400,0*  
*0*

juni 2024 dengan NTPN : 786001GCAHGQSMG, dan pengembalian belanja honorarium pejabat pengadaan barang / jasa bulan januari 2024 An. Riswan **Rp408.000** dan telah disetorkan pada tanggal 28 jni 2024 dengan NTPN : A7A915229RM2ESIQ.

### ***B.5 Belanja Modal***

Realisasi Belanja Modal semester I TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp259,289,400,00 dan Rp495.008.264,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada semester I TA 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi semester I TA 2023. Realisasi TA 2024 menurun diakibatkan karena adanya pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 79 unit dengan nilai sebesar Rp262.920.111,00.

### *Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2022	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	536.128.670	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	23.007.273	0,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	495.008.264	-	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>495.008.264</b>	<b>559.135.943</b>	<b>12,95</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>495.008.264</b>	<b>559.135.943</b>	<b>12,95</b>

*Belanja Modal  
Tanah Rp0*

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah semester I TA 2024 dan semester I TA 2023 adalah sebesar Rp0 dikarenakan tidak adanya pembelian modal tanah untuk semester I TA 2024 dan 2023.

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp259.289.400,0  
0*

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin semester 1 TA 2024 sebesar Rp259.289.400,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin semester 1 TA 2024 dan 2023**

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023
Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	157.000.000	
Uninterruptible Power Supply (UPS)	5.940.000	
Video Conference	3.882.700	
Lap Top	67.500.000	
Printer	13.000.000	
Tablet PC	11.966.700	
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin		495.008.264
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>259.289.400</b>	<b>495.008.264</b>
Pengembalian	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>259.289.400</b>	<b>495.008.264</b>

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0*

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
Semester 1 TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Pengukuran dan Pematangan Lahan	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(100,00)</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(100,00)</b>

*Belanja Modal  
Perencanaan  
dan  
Pengawasan  
Gedung dan  
Bangunan Rp0*

***B.5.4 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan***

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan per semester I TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00

*Belanja Modal  
Penambahan  
Nilai Gedung  
dan Bangunan  
Rp0*

***B.5.5 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan***

Realisasi belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan pada semester I TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi  
dan Jaringan*

***B.5.6 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan***

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada semester I TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah

*Rp0* sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal  
Perencanaan  
dan  
Pengawasan  
Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp0*

### **B.5.7 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan pada semester 1 TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp Rp0.

*Belanja Modal  
Aset Tetap  
Lainnya Rp0*

### **B.5.8 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada semester 1 TA 2024 adalah sebesar Rp0. sedangkan untuk semester 1 TA 2023 adalah sebesar Rp0.

*Belanja  
Bantuan Sosial  
Rp0*

### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Pada semester 1 TA 2024 dan TA 2023 tidak menganggarkan untuk belanja bantuan sosial.

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran*

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023

*Rp300.000.000,00* adalah sebesar Rp300.000.000,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Uang tunai pada bendahara adalah uang tunai di brankas per 30 Juni 2024 Rp9.485.621,00 dan uang di rekening bank sebesar Rp290.514.379,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai	9.485.621	-
Bank BRI No. Rek 651152502631000	290.514.379	-
Kas Pada BPP	-	-
Uang Muka	-	-
Kwitansi yang belum di SPM-kan	-	-
<b>Sub Total I</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>
Selisih Kas Bendahara Pengeluaran (tidak ada pecahan uang kecil)	-	-
<b>Sub Total II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Jumlah (Sub Total I - II)	300.000.000	-
Kas Bendahara Pengeluaran pada Neraca	300.000.000	-
Selisih Kas Bendahara Pengeluaran (karena pembulatan)	-	-

*Kas di Bendahara Penerimaan Rp0*

### **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Tidak ada Bendahara Penerimaan pada Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024.

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Tidak terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

<i>Piutang PNBP</i> <i>Rp0</i>	<b>C.4 Piutang PNBP</b> Tidak Terdapat saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00
<i>Bagian Lancar</i> <i>Tagihan TP/TGR</i> <i>Rp0</i>	<b>C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)</b> Tidak terdapat Penyelesaian Ganti Rugi per Semester I 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.
<i>Bagian Lancar</i> <i>TPA</i> <i>Rp0</i>	<b>C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b> Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.
<i>Piutang Tak</i> <i>Tertagih –</i> <i>Piutang Lancar</i> <i>Rp0</i>	<b>C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar</b> Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.
<i>Beban Dibayar</i> <i>di Muka</i> <i>Rp0</i>	<b>C.8 Beban Dibayar di Muka</b> Tidak terdapat saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.
<i>Pendapatan yang</i> <i>Masih Harus</i> <i>Diterima</i> <i>Rp0</i>	<b>C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima</b> Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.
<i>Persediaan</i> <i>Rp381.512.682,</i> <i>00</i>	<b>C.10 Persediaan</b> Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp381.512.682,00. Persediaan adalah aset lancar dalam

bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	109.182.802	85.208.292
Suku Cadang	272.329.880	114.764.897
<b>Jumlah</b>	<b>381.512.682</b>	199.973.189

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Jenis Persediaan sesuai dengan Berita Acara Opname Persediaan TA 2024 nomor B.2075/PSDKPSta.8/PL.450/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

### 1. Barang Konsumsi

Persediaan berupa Barang Konsumsi (kode 117111) senilai Rp109.182.802,00 yang terdiri atas :

- a. Alat Tulis senilai sebesar Rp4.306.630,00
- b. Penjepit Kertas sebesar Rp14.512.840,00
- c. Penghapus/Korektor sebesar Rp268.970,00
- d. Buku Tulis sebesar Rp10.041.900,00
- e. Ordner dan Map sebesar Rp11.075.208,00
- f. Penggaris sebesar Rp110.600,00

- g. Cutter (Alat Tulis Kantor) sebesar Rp711.380,00
- h. Alat Perekat sebesar Rp3.137.320,00
- i. Staples sebesar Rp3.335.000,00
- j. Isi Staples sebesar Rp1.169.500,00
- k. Alat Tulis Kantor Lainnya sebesar Rp189.912,00
- l. Kertas HVS sebesar Rp14.014.390,00
- m. Berbagai Kertas sebesar Rp5.156.340,00
- n. Kertas Cover sebesar Rp757.850,00
- o. Amplop sebesar Rp480.000,00
- p. Tinta/Toner Printer sebesar Rp26.963.060,00
- q. USB/Flash disk sebesar Rp6.365.000,00
- r. Mouse sebesar Rp2.505.000,00
- s. Bahan Komputer Lainnya sebesar Rp61.050,00
- t. Batu Baterai sebesar Rp1.604.370,00
- u. Meterai Rp470.000,00
- v. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp1.946.482,00

## 2. Suku Cadang

Persediaan berupa Suku Cadang (Kode 117114) sebesar Rp272.329.880,00 yang terdiri atas;

- a. Suku cadang alat angkut apung bermotor sebesar Rp 272.329.880,00
- b. Suku cadang alat bengkel tidak bermesin, sebesar Rp0,00

### Mutasi Persediaan Per 30 Juni 2024

KODE	URAIAN	NILAI	MUTASI		NILAI
		S/D 01-JAN-2024	TAMBAH	KURANG	S/D 30-JUN-2024
117111	Barang Konsumsi	85,208,292	61,028,900	37,054,390	109,182,802
117114	Suku Cadang	114,764,897	251,598,079	94,033,096	272,329,880
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
Jumlah		199,973,189	312,626,979	131,087,486	381,512,682

*Tagihan  
TP/TGR  
Rp0*

### C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak Terdapat Penyelesaian Ganti Rugi Per Semester 1 30 Juni 2024

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2024.

*Penyisihan*

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka

*Piutang tak*

*Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang  
Rp0*

## **Panjang**

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.

*Tanah*

*Rp4.529.803.000,  
00*

## **C.14 Tanah**

Tanah yang dimiliki Stasiun PSDKP Biak per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp4.529.803.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

<b>Mutasi Tambah :</b>	
Transfer Masuk	Rp -
Selisih Revaluasi Aset	Rp -
Hibah	-
Reklasifikasi	-
Pengembangan Melalui KDP	Rp -
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Penghapusan	-
<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>	<b>4.529.803.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2023</b>	<b>Rp 4.529.803.000</b>

Dengan detail Sertifikat sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 26.09.12.04.4.00014 tanggal 02 Desember 2015 berlokasi di Biak Papua;
2. Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 26.10.03.14.4.00017 tanggal 12 April 2016 berlokasi di Jayapura Papua;
3. Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia nomor 33.01.04.02.4.00044 tanggal 19 Februari 2016 berlokasi di Manokwari Papua Barat;

*Peralatan dan  
Mesin  
Rp27.219.095.476  
,00*

### C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per semester 1 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp27.219.095.476,00 dengan saldo awal per TA 2024 adalah Rp27.222.726.187,00, mutasi tambah berupa pembelian Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) dan Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dengan total nilai sebesar Rp259.289.400,00 dan pengurangan nilai melalui penghapusan sebesar Rp262.920.111,00.

#### Daftar Jurnal Mutasi Peralatan dan Mesin

KDSATKER	JNSDOK1		TRN_BMN		RPHREAL
032.05.250263	406	JRNBMN	101	Pembelian	241.609.219,
032.05.250263	406	JRNBMN	202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	17.680.181,
032.05.250263	406	JRNBMN	401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(262.920.111,)
032.05.250263	999	SAWAL	999	Saldo Awal	27.222.726.187,
<b>TOTAL</b>					<b>27.219.095.476,</b>

Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 sebesar Rp259.289.400,00 berasal dari pembelian berikut

Penjelasan mutasi kurang BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Mesin Las Listrik sebesar Rp 5.522.726,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Kunci Moment sebesar Rp 17.684.095,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 3 unit Rol Meter sebesar Rp 1.498.755,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 3 unit Mesin Battery Set / Pengisi Accu sebesar Rp 14.911.962,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450 /III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 2 unit Global Positioning System sebesar Rp 8.250.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 3 unit Senter Bawah Air sebesar Rp 1.693.755,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Alat Ukur / Test Klinis Lainnya sebesar Rp 660.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 3 unit Papan Visual/Papan Nama sebesar Rp 11.000.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450 /III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 2 unit Alat Pengaman / Sinyal sebesar Rp 3.062.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 5 unit Alat Penerjemah sebesar Rp 11.136.365,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Meja Kerja Kayu sebesar Rp 2.750.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan

berupa 2 unit Kursi Besi/Metal sebesar Rp 2.310.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Mesin Cuci sebesar Rp 4.181.300,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 3 unit A.C. Split sebesar Rp 14.399.330,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Reach In Freezer sebesar Rp 6.220.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Kompor Listrik (Alat Dapur) sebesar Rp 8.525.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Dispenser sebesar Rp 1.831.500,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 2 unit Mesin Pengering Pakaian sebesar Rp

12.466.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 5 unit Digital Video Effect sebesar Rp 17.930.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 4 unit Camera Under Water sebesar Rp 33.312.172,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 2 unit Teropong/Keker sebesar Rp 7.381.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Senter sebesar Rp 1.800.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 3 unit Angle Measuring Tools (Jangka Sorong) sebesar Rp 1.693.755,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit P.C Unit sebesar Rp 10.000.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B

.886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 2 unit Lap Top sebesar Rp 19.949.804,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Note Book sebesar Rp 15.000.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 16 unit Life Jacket sebesar Rp 10.518.775,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 3 unit Jet Pump sebesar Rp 7.731.817,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Treadmill sebesar Rp 9.500.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B .886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

### **C.16 Gedung dan Bangunan**

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp6.303.821.055,00*

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 adalah Rp6.303.821.055,00 merupakan bangunan gedung kantor permanen. Sedangkan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 yakni Rp Rp6.303.821.055,00.

*Jalan,Irigasi dan  
Jaringan  
Rp855.830.143,00*

### **C.17 Jalan,Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 adalah Rp855.830.143,00 yang terdiri atas Jalan Lainnya sebesar Rp349.959.593,00, Bangunan Talud penahan sebesar Rp195.000.000,00, Bangunan Penampung Air Baku sebesar Rp295.870.550,00 dan Jaringan Listrik Lainnya Rp15.000.000,00.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp0*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing dengan nominal Rp0 dan Rp0.

*Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp52.387.273,00*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Konstruksi Dalam Pengerjaan semester I TA 2024 yaitu sebesar Rp52.387.273,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan

adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

*Realisasi Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan semester I TA 2024 dan 2022*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Awal Tahun	52.387.273	52.387.273
Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Pengembangan KDP	-	-
Perolehan/Penambahan KDP		495.008.264
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>52.387.273</b>	<b>547.395.537</b>
Pengembalian	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>52.387.273</b>	<b>547.395.537</b>

- Terdapat saldo perolehan KDP pada semester I TA 2024 yang diperoleh dari saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Awal Tahun berupa Perencanaan Pagar Manokwari sebesar Rp52.387.273,00.

Rincian KDP tersebut berupa :

Jenis Konstruksi	Nama Konstruksi	NUP	Tahun Perolehan	Nilai
------------------	-----------------	-----	-----------------	-------

Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Perencanaan Pagar Wilker Manokwari	3	2017	52.387.273
Jumlah Total KDP				52.387.273

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(25.066.938.168,00)*

### C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 Rp(25.066.938.168,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi penyusutan aset tetap per 30 Juni 2024 sebagai berikut;

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	27.219.095.476	(24.242.534.064)	2.976.561.412
2	Gedung dan Bangunan	6.303.821.055	(650.972.182)	5.652.848.873
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	859.740.143	(173.431.922)	686.308.221
4	Aset Tetap Lainnya	0	-	0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>34.382.656.674</b>	<b>(25.066.938.168)</b>	<b>9.315.718.506</b>

*Aset Tak  
Berwujud Rp0*

### **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 adalah Rp0. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain  
Rp0*

### **C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 merupakan aset tetap yang tidak digunakan dikarenakan kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya Rp0*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan semester 1 per tanggal 30 Juni 2024 Rp0

*Uang Muka dari  
KPPN  
Rp300.000.000,0  
0*

### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 sebesar Rp300.000.000,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp268.915.481,00*

### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Terdapat utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 senilai Rp268.915.481,00 yang berasal dari pembayaran Gaji Induk PNS bulan Juli sebesar Rp194.466.570,00, Gaji Induk PPPK Bulan Juli sebesar Rp49.338.911,00 dan gaji PPNPN bulan Juni sebesar Rp25.110.000,00 yang tanggal SP2D ditanggal 1 Juli 2023 sehingga masih tercatat pada neraca.

*Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0*

### **C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan**

Tidak terdapat Pendapatan Ditangguhkan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2022

*Pendapatan Diterima di Muka Rp0*

### **C.27 Pendapatan Diterima di Muka**

Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Desember 2023.

*Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0,00*

### **C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 adalah senilai Rp0.

*Ekuitas Rp14.006.595.980,-*

### **C.29 Ekuitas**

Ekuitas per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp14.006.595.980,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan*

*PNBP*

*Rp3.162.536,00*

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.162.536,00. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa sewa Gedung dan bangunan (sewa 4 unit rumah negara) Bulan Januari s.d Bulan April 2024.

#### *Rincian Pendapatan TA 2024 dan 2023*

URAIAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
<b>PENDAPATAN</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.162.536	5.534.438
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.162.536</b>	<b>5.534.438</b>

Pendapatan (Pendapatan Negara Bukan Pajak) tahun anggaran 2024 adalah pendapatan yang diperoleh dari:

1. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Januari 2024 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 001A;
2. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Februari 2024 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 005A ;
3. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Maret 2024 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 0102A;
4. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan April

2024 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 075T;

*Beban Pegawai* **D.2 Beban Pegawai**

*Rp3.923.543.860,00*

Jumlah beban pegawai 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.923.543.860,00 sedangkan jumlah beban pegawai 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.862.611.716,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Gaji Pegawai adalah sebagai berikut :

*Beban  
Persediaan  
Rp37.054.390,0  
0.*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023
Beban Gaji Pokok PNS	1.270.977.500	1.207.538.100
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.349	19.942
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	101.797.530	96.389.820
Beban Tunj. Anak PNS	34.317.732	31.396.032
Beban Tunj. Struktural PNS	8.100.000	8.100.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	21.910.000	22.280.000
Beban Tunj. PPh PNS	9.859.536	274.900
Beban Tunj. Beras PNS	89.438.700	91.466.460
Beban Tunj. Umum PNS	50.735.000	59.320.000
Beban Uang Makan PNS	73.090.000	84.599.000
Beban Uang Lembur	36.035.000	33.195.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	122.350.000	131.820.000
Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan PNS	1.296.816.820	1.096.212.462
Beban Gaji Pokok PPPK	325.691.600	
Beban Pembulatan Gaji PPPK	6.709	
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	12.183.460	
Beban Tunj. Anak PPPK	2.559.222	
Beban Tunj. Fungsional PPPK	28.740.000	
Beban Tunj. Beras PPPK	14.411.580	
Beban Uang Makan PPPK	22.894.000	
Beban Uang Lembur	22.537.000	
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	32.400.000	
Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan PPPK	346.674.122	
<b>Jumlah Beban Bersih</b>	<b>3.923.543.860</b>	<b>2.862.611.716</b>

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni

2023 adalah masing-masing sebesar Rp37.054.390,00 dan Rp48.628.678,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	37.054.390	48.628.678	(23,80)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	-
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	-
Bahan Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga - jaga	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya	0	0	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>37.054.390</b>	<b>48.628.678</b>	<b>(23,80)</b>

*Beban Barang dan Jasa Rp2.453.783.141,00.*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.453.783.141,00 dan Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp6.645.054.651,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa dapat dirincikan pada tabel berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2022	30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	405.007.911	787.062.814	(48,54)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	91.027.700	66.090.965	37,73
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.067.300	5.766.064	5,22
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	36.070.000	76.700.000	(52,97)
Beban Bahan	1.025.783.923	4.967.164.091	(79,35)
Beban Barang Operasional lainnya		142.033.010	(100,00)
Beban Honor Output Kegiatan	3.050.000	2.730.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	97.271.700	199.634.200	(51,28)
Beban Langganan Listrik	119.140.760	87.655.000	35,92
Beban Langganan Telepon	32.584.325	55.987.609	(41,80)
Beban Langganan Air	16.112.084	18.279.698	(11,86)
Beban Sewa	165.500.050	166.000.000	(0,30)
Beban Jasa Profesi	1.700.000	0	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	454.467.388	69.951.200	549,69
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		0	0
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>2.453.783.141</b>	<b>6.645.054.651</b>	<b>(63,07)</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp,370.071.001  
00*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp370.071.001,00 dan Rp523.853.588,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

#### *Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan TA 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.192.068	7.289.300	163,29
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	256.845.837	405.570.303	(36,67)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan			100,00
Beban Persediaan Suku Cadang	94.033.096	110.993.985	(15,28)
<b>Jumlah</b>	<b>370.071.001</b>	<b>523.853.588</b>	<b>(29,36)</b>

*Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp1.382.713.189,00*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.382.713.189,00 dan Rp886.814.852,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester I Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.057.874.826	706.393.518	49,76
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.600.000	4.200.000	(20,82)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.000.000		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	260.238.363	176.221.334	47,68
<b>Jumlah</b>	<b>1.382.713.189</b>	<b>886.814.852</b>	<b>55,92</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat Rp0*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.

*Beban Bantuan  
Sosial Rp0*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Tidak ada Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp1.307.090.106*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.307.090.106,00 dan Rp885.372.852,00. Beban

,00

Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK/TURUN %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.220.715.565	798.998.311	52,78
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	63.038.212	63.038.212	-
Beban Penyusutan Irigasi	5.648.382	5.648.382	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	17.497.980	17.497.980	-
Beban Penyusutan Jaringan	189.967	189.967	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>1.307.090.106</b>	<b>885.372.852</b>	<b>47,63</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.307.090.106</b>	<b>885.372.852</b>	<b>47,63</b>

*Beban*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

*Penyisihan*

Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.

*Piutang Tak*

*Tertagih Rp(0)*

*Beban Transfer*

#### **D.11 Beban Transfer**

*Rp0*

Tidak ada Beban Transfer per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp2.049.700,00

#### D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.049.700,00 dan Rp4.770.930,00. Surplus dari kegiatan non operasional berasal dari penjualan peralatan & mesin inventaris kantordengan Risalah Lelang Nomor 67/17.04/2024-01 Tanggal 30 Mei 2024 NTB 240603306184, NTPN 865263CIFKA1IVSD.

URAIAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.049.700,00	4.770.930
<b>Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>2.049.700,00</b>	<b>4.770.930</b>
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0,00	
Penerimaan Kembali Belanja Modal TA Yang lalu	0,00	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TA yang lalu	0,00	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0
<b>Jumlah Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	7.649.017	0

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan*

*metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2018.*

Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp7.649.017,00 dan Rp0,00.

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar

<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>30 Juni 2024</b>	<b>30 Juni 2023</b>
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Rp7.649.017,00	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp7.649.017,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada 30 Juni 2024 terjadi karena melakukan Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan yang masih memiliki nilai buku dengan rincian sebagai berikut:

1. Usulan Penghapusan 1 unit Mesin Cuci dengan sisa nilai buku besar Rp836.260,00;
2. Usulan Penghapusan 1 unit Mesin Las Listrik dengan sisa nilai buku besar Rp2.485.228,00;
3. Usulan Penghapusan 1 unit A.C. Split dengan sisa nilai buku besar Rp394.933,00;
4. Usulan Penghapusan 1 unit Mesin Pengering Pakaian dengan sisa nilai buku besar Rp1.516.400,00;

5. Usulan Penghapusan 3 unit Jet Pump dengan sisa nilai buku besar Rp2.416.196,00;

*Pos Luar Biasa*  
*Rp0*

#### **D.13 Pos Luar Biasa**

Tidak ada saldo pada Pos Luar Biasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.

### **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp15.146.176.350,00*

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.146.176.350,00 dan Rp15.483.258.786,00

*Defisit LO*  
*Rp(9.476.692.468,00)*

#### **E.2 Surplus/(Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp(9.476.692.468,00) dan Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(11.842.030.969,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian  
Nilai Aset  
Rp0*

### **E.3 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp0*

### **E.4 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak ada Koreksi nilai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.

*Selisih Revaluasi  
Aset Rp0*

### **E.5 Selisih Revaluasi Aset**

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak ada nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp0.

*Koreksi Nilai  
Aset Non  
Revaluasi Rp  
(00)*

### **E.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas aset yang diakibatkan adanya kenaikan aset tersebut atau karena rendahnya nilai aset dalam laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp Rp(7.270.526,00) .

*Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-	(7.270.526)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>(7.270.526)</b>

*Koreksi Lain-lain* **E.7 Koreksi Lain-lain**

*Rp74.898,00*

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp74.898,00 dan Rp0. Koreksi Lain-lain berasal dari hasil Jurnal Balik atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

*Transaksi Antar* **E.8 Transaksi Antar Entitas**

*Entitas*

*Rp8.337.037.20*

*0,00*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing – masing sebesar Rp8.337.037.200,00 dan Rp11.358.629.924,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.357.228.940	11.368.144.658
Diterima dari Entitas Lain	(20.191.740)	(9.514.734)
Transfer Masuk	-	-
Transfer Keluar	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>8.337.037.200</b>	<b>11.358.629.924</b>

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp(20.191.740,00), sedangkan DKEL sebesar Rp8.357.228.940,00. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0.

*Kenaikan/  
Penurunan  
Ekuitas  
Rp(1.139.580.3  
70,00)*

#### **E.5 Kenaikan / Penurunan Ekuitas**

Nilai Kenaikan/Penurunan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp(1.139.580.370,00) dan 30 Juni 2023 sebesar Rp(490.671.571,00)

*Ekuitas Akhir  
Rp14.006.595.9  
80,00*

#### **E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp14.006.595.980,00 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp14.992.587.215,00

## **1. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian penting sampai akhir periode pelaporan per 30 Juni 2024 pada Stasiun PSDKP Biak

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.30/MEN/KU.611/2020 tanggal 03 Juli 2020 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.42/PSDKPSta.8/KU.110/2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak; dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.043/PSDKPSta.8/KU.110/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak. Adapun pejabat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

KPA : Mochamad Erwin, S.St.Pi.,MH.  
PPK : Exfar Alli Ridwan, S.Pi  
PPSPM : Julistrio Boby, S.Pi  
Bendahara : Ariyanti Sastriani S.Pi  
Pengeluaran

2. Stasiun PSDKP Biak telah dan/atau sedang melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa pada Semester I Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan secara kontraktual, pekerjaan tersebut diantaranya:
- a. Pekerjaan Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Nabire dilaksanakan sesuai dokumen perjanjian sewa gedung kantor nomor 014/PPK/PSDKPSta.8/KU.430/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan nilai kontrak Rp55.000.000,00 (termasuk pajak). Tanggal kontrak mulai dari 1 Januari – 31 Desember 2024. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 017/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.
  - b. Pekerjaan Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Manokwari dilaksanakan sesuai dokumen perjanjian sewa gedung kantor nomor 031/PPK/PSDKPSta.8/KU.430/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 dengan nilai kontrak Rp55.000.000,00 (termasuk pajak). Tanggal kontrak mulai dari 1 Januari – 31 Desember 2024.

Pekerjaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor B.032/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.

- c. BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04 dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak nomor SP-003/PNDB10000/2024-S3 tanggal 9 Januari 2024. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp4.190.640.000,00 pelaksanaan kontrak tanggal 1 Januari – 31 Desember 2024.
- d. Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak/ SPK nomor 075/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/III/2024 tanggal 25 Maret 2024. Nilai kontrak pada pekerjaan ini sebesar Rp229.720.959,00 (termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak 120(Seratus dua puluh) hari kalender. Pengadaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 118/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/V/2024 tanggal 24 Mei 2024.

### 3. Sisa BBM KAPAL PENGAWAS HIU MACAN 04

Nama Kapal	Bulan	Tanggal BBM Awal	Sisa Volume BBM Awal (Liter)	Jumlah Pengisian (Liter)	Pemakaian (Liter)	Tanggal BBM Akhir	Jumlah Sisa BBM Akhir (Liter)
a	b	c	d	e	f	g	h = (d+e-f)
KP. Hiu Macan 04	Januari	29/12/2023	40.306	-	522	31/01/2024	39.784
	Februari	31/01/2024	39.784	-	450	29/02/2024	39.334
	Maret	29/02/2024	39.334	30.000	45.874	31/03/2024	23.460
	April	31/03/2024	23.460	-	1.160	30/04/2024	22.300
	Mei	30/04/2024	22.300	-	550	31/05/2024	21.750
	Juni	31/05/2024	21.750	-	18.990	01/07/2024	2.760

#### Keterangan :

- Sisa BBM per 30 Juni 2024 sesuai berita acara akhir bulan (Juni) adalah 2.760 Liter;
- BBM yang di titip di Galangan (Docking) adalah 18.660 liter (sesuai dengan Berita Acara Penitipan BBM tanggal 8 Juni 2024);
- Total sisa BBM KP HMC 04 per Juni 2024 adalah =  $2.760 + 18.660 = 21.420$  Liter

### 4. Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun PSDKP Biak terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan V dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 3 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Biak dengan pagu mencapai Rp11.715.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.604.947.989,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)		
		Pagu	Realisasi	%
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	6.726.075.000	1.310.603.676	19,49
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	381.450.000	127.377.270	33,39
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	3.542.725.000	796.801.733	22,49
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	450.000.000	180.178.875	40,04
2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	75.000.000	24.460.000	32,62
2353.QIC.004	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	350.000	165.526.435	47,29
Total		11.175.600.000	2.604.947.989	23,30

2. Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, namun dalam pelaksanaannya program prioritas tersebut tidak terdapat di Stasiun PSDKP Biak.

